

Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis E-Government di Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Oleh:

Nurul Khikmawati

Dosen Pembimbing : Lailul Mursyidah

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Desember, 2022

Pendahuluan

- Berdasarkan UU No 6 tahun 2004 tentang desa menyatakan bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan di dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan. [1]
- Sedangkan menurut Perubahan atas Undang- undang No. 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam ayat 1 pasal 7 poin f yang berbunyi Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melakukan penugasan kepada Desa dalam menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan dengan berdasarkan asas tugas perbantuan. [7]
- Inovasi Pelayanan Publik ialah suatu cara terobosan terbaru dalam mengembangkan ide berbasis teknologi dimana berguna dalam memperbarui, menyederhanakan, atau bahkan bisa mengganti metode pelayanan publik yang terkesan tidak efektif dan efisien. [8]

Pendahuluan

[2]

Dalam rangka merealisasikan Undang-Undang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam rencana strategis memiliki visi Terwujudnya Sistem Adminitrasi Kependudukan yang Tertib, Akurat, dan Dinamis. Dengan misi nya :

- 1) Peningkatan tertib administrasi kependudukan.
- 2) Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
- 3) Terwujudnya data base perkembangan kependudukan yang akurat

- Salah satu Inovasi layanan online yang sudah diterapkan di Kabupaten Pasuruan tepatnya di Kecamatan Sukorejo adalah program E-Pak Ladi.
- E – Pak Ladi merupakan model inovasi layanan administrasi kependudukan yang memiliki kepanjangan Elektronik Pelayanan Administrasi Kependudukan Langsung Jadi. E – Pak Ladi hanya dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan dan dilaksanakan di setiap Desa di Kecamatan yang berada di Kabupaten Pasuruan.
- Total desa di Kabupaten Pasuruan berjumlah 365 desa, sebanyak 301 desa sudah menerapkan E-Pak Ladi, tinggal 64 desa yang belum. Kecamatan Sukorejo sendiri terdapat 19 Desa. Berikut rekapitulasi permohonan E-Pak Ladi di Kecamatan Sukorejo, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Desa Kecamatan Sukorejo yang belum dan sudah menerapkan E- Pak Ladi.

No	Nama Desa	Jumlah Permohonan	
		2021	2022
1.	Desa Karangsono	34	572
2.	Desa Sukorejo	128	1000
3.	Desa Lemahbang	0	601
4.	Desa Tanjungsarum	37	534
5.	Desa Suwayuwo	89	1082
6.	Desa Lecari	0	150
7.	Desa Pakukerto	37	534
8.	Desa Kalirejo	48	976
9.	Desa Sukorame	21	205
10.	Desa Mojotengah	27	738
11.	Desa Wonokerto	34	734
12.	Desa Curahrejo	32	496
13.	Desa Galagahsari	68	851
14.	Desa Gunting	15	590
15.	Desa Sebandung	32	753
16.	Desa Dukuhsari	7	276
17.	Desa Ngadimulyo	23	1170
18.	Desa Candibinangun	80	694
19.	Desa Kenduruan	18	576

Sumber : Diolah Peneliti dari Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan

Kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pasuruan masih sangat terkesan tradisional dan berbelit -belit bahkan masyarakat harus kembali berkali-kali dalam menyelesaikan dokumen kependudukan nya.

COVID-19

UU, VISI ,MISI
DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIIL

PEMANFAATAN ILMU
TEKNOLOGI DAN
INFORMASI

**INOVASI LAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN BERBASIS DIGITAL**

E – PAK LADI

Penelitian Terdahulu

Hisyam Al Fawwas diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019.

Berjudul “Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan usaha secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Hukum Islam)”

- Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelayanan perizinan mendirikan usaha melalui sistem online single windows dan persoalan yang dihadapi beserta cara mengatasinya.
- Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kendala para pelaku usaha enggan untuk mendaftarkan usahanya.

Penelitian Terdahulu

Nafahatus Sahariyah
diterbitkan oleh Universitas
Islam Sunan Ampel Surabaya
tahun 2019.

Berjudul “Implementasi
Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan
di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Jombang”

- Tujuan dari penelitian untuk mengetahui implementasi SIAK berbasis daring dan manfaatnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jombang.
- Hasil Penelitian ini adalah SIAK berbasis daring digunakan sebagai pengganti SIMDUK yang sedikit banyak membantu kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penelitian Terdahulu

Jurnal dari Dwi Febi Kartika dan Trena Aktiva Oktariyanda diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Administrasi Negara Tahun 2022

Judul “Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Poedak (Pelayanan Online Pendaftaran Administrasi Kependudukan) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik”.

- Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan terkait pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Gresik melalui inovasi aplikasi poedak.
- Hasil Penelitian dari penelitian ini menunjukkan dari indikator tata kelola dan inovasi bahwa sistem regulasi atau kebijakan yang digunakan telah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Penelitian Terdahulu

Jurnal dari Jenasti Viona dan Khairiyah tahun 2022 diterbitkan oleh Jurnal Suara Politik.

Judul “Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis E-Government (Studi Kasus : Kendala Pemerintah Kota Padang dalam Penerapan E-Government)”.

- Tujuan dari Penelitian adalah menyajikan analisis tentang mengapa pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia belum sepenuhnya bisa mentransformasikan penyelenggaraan pemerintahannya berbasis e-government.
- Hasil dari penelitian tersebut yaitu implementasi e-government di Indonesia masih setengah jalan dan jauh dibawah standar ideal yang diinginkan

Penelitian Terdahulu

Jurnal dari Ilmi Usrotin
Choiriyah tahun 2020

Judul “Penerapan E-
Government Melalui M-
Bonk di Kabupaten
Sidoarjo”

- Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis tahapan pelaksanaan, prosedur, dan kendala dalam implementasi e-government melalui M-Bonk di Kabupaten Sidoarjo.
- Hasil penelitian menunjukkan tahapan implementasi e-government, prosedur pengajuan, dan kendala dalam penerapan M-bonk di Kabupaten Sidoarjo.


Perbedaan SOA

Penulis akan fokus mendeskripsikan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government di Desa Karangsono beserta kendala dalam inovasi pelayanan tersebut.


Secara tidak langsung perbedaan lainnya yaitu menjelaskan sistem kerja administrasi kependudukan yang sudah terinovasi kepada masyarakat awam dan memberikan solusi kepada pihak yang mengadopsi sistem administrasi kependudukan yang mengalami kendala yang sama.

Serta memberikan gambaran / ROLE MODE terkait pelayanan yang berbasis e-government kepada pihak yang ingin mengadopsi inovasi administrasi kependudukan berbasis e-government.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)



Bagaimana inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government di Desa Karangsono ?



Bagaimana kendala dalam inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government di Desa Karangsono ?

Metode

Bersifat
deskriptif
kualitatif

- Fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti diantaranya inovasi pelayanan adminitrasi kependudukan berbasis e-government di Desa Karangsono, dan
- kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam menerapkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government di Desa Karangsono.

Teknik pengumpulan data diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (Buku Metode Penelitian Sosial dari Dr. Ulber Silalahi, MA.

HASIL

A. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis E-Government di Desa Karangsono.

Penerapan e-government di Indonesia dapat dilakukan secara sistematis melalui strategi yang realistis dan struktur. Strategi tersebut melalui terdapat empat tahapan antara lain [16] :

- a. **Tingkat Persiapan** : meliputi pembuatan situs atau website di setiap lembaga, mempersiapkan perangkat atau piranti keras maupun lunak yang dibutuhkan, penyiapan sumber daya manusia , dan sosialisasi terkait website yang informatif untuk internal maupun eksternal (untuk masyarakat).
- b. **Tingkat Pematangan** : seperti pembuatan fitur yang bisa berinteraksi antara pemerintah dengan pengunjung website dan bisa menghubungkan ke antar lembaga (*hyperlink*).
- c. **Tingkat Pematapan** : pembuatan situs dengan menyediakan fasilitas transaksi layanan publik secara online. Dan menyatukan aplikasi dan data dengan lembaga lain (interoperabilitas).
- d. **Tingkat Pemanfaatan** : memiliki sifat kemanfaatan terhadap G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Business*), dan G2C (*Government to Citizen*) yang terintegrasi.

Pembahasan (Hasil Penelitian Lapangan)

Tingkat Persiapan

- Mempersiapkan semua mulai dari perangkat keras hingga *software* (perangkat lunak),
- SDM yang memiliki kemampuan di bidang IT,
- dan Sosialisasi internal dan publik yang diperlukan.

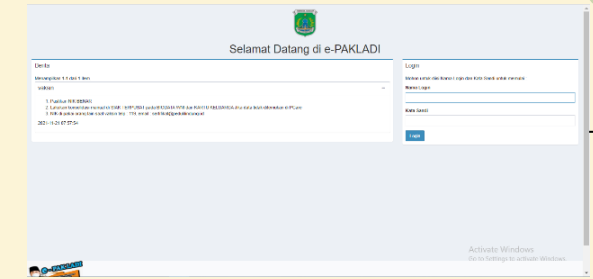
Karena ketika semua piranti sudah siap baru kantor balai desa bisa mendaftarkan layanan e-pak ladi ke pusat. Setelah itu akan dilakukan kunjungan secara langsung untuk dinilai sudah sesuai atau belum dengan standar yang sudah disiapkan dan arahan dari pemerintah pusat

Pembahasan (Hasil Penelitian Lapangan)

Tingkat Persiapan

- Dari kedua gambar tersebut menunjukkan sudah ada beberapa indikator teori tahapan penerapan e-government pada tingkat persiapan, namun ada perbedaan teori dengan hasil di lapangan yaitu tidak adanya sosialisasi secara eksternal kepada masyarakat.
- Sedangkan di tingkat persiapan dalam penelitian terdahulu dalam jurnal Ilmi Usrotin Choiriyah tahun 2020 dengan judul “Penerapan E-Government Melalui M-Bonk di Kabupaten Sidoarjo” sudah sesuai dengan teori yang digunakan bahwa dalam tingkat persiapan aplikasi M-Bonk adalah membuat situs informasi di setiap lembaga, menyiapkan SDM, menyiapkan sarana akses yang mudah, dan sosialisasi secara internal maupun publik.

Gambar 1. Tampilan awal software E-Pak Ladi



Menjelaskan pembuatan situs untuk sistem E- Pak Ladi yang dimana halaman awal nya adalah halaman login untuk admin E-Pak Ladi masuk ke dalam situs tersebut.

Gambar 2. Sosialisasi Internal Inovasi E- Pak Ladi di Kecamatan Sukorejo



Merupakan sosialisasi internal yang di tunjukkan untuk semua kepala desa dan menjelaskan bagaimana mengoperasikan sistem kerja E-Pak Ladi.

(Sumber : Pemerintah desa karangsono, 2022)

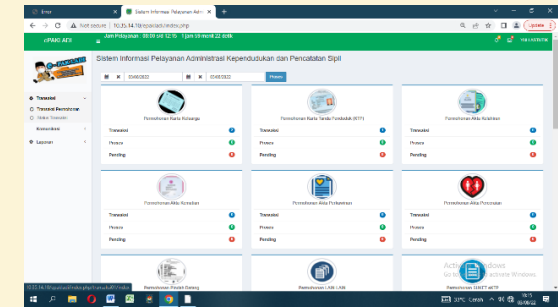


Pembahasan (Hasil Penelitian Lapangan)

Tingkat Pematangan

- Dalam Layanan E-Pak Ladi terdapat fitur apply formulir atau berkas yang dibutuhkan untuk pembuatan administrasi kependudukan. Pematangan ini lebih kepada bentuk software aplikasi yang digunakan untuk mengunggah, mengupload berkas sudah berjalan normal sesuai fungsinya atau belum.
- Dan sejauh ini untuk sistem E- Pak Ladi tidak bisa menghubungkan secara langsung kepada masyarakat, atau berarti masyarakat masih harus ke balai desa untuk mengantarkan berkas yang dibutuhkan dalam pembuatan administrasi kependudukan, sehingga masyarakat yang ingin mengakses situs resmi E-Pak Ladi tidak bisa karena hanya Admin E – Pak Ladi yang bisa mengaksesnya. Namun secara tidak langsung dengan melalui layanan E-Pak Ladi ini masyarakat bisa langsung terhubung dengan dispendukcapil.

Gambar 3. Fitur apply formulir Permohonan Administrasi Kependudukan



Menampilkan fitur permohonan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti

- permohonan kartu keluarga,
- permohonan KTP,
- permohonan akta kelahiran,
- permohonan akta kematian,
- permohonan akta perceraian,
- permohonan akta perkawinan,
- permohonan pindah datang,
- permohonan lain-lain, dan permohonan suket E-KTP.

(Sumber : Pemerintah desa karangsono, 2022)

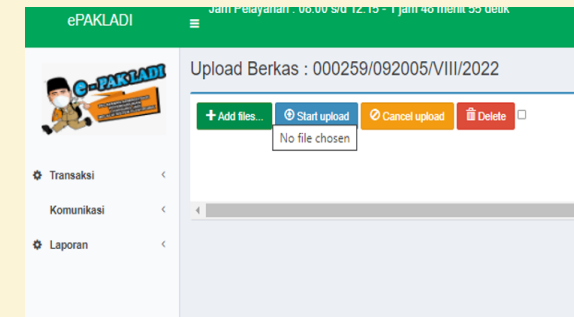


Pembahasan (Hasil Penelitian Lapangan)

Tingkat Pematangan

- Dari hasil tingkat pematangan proses E-Pak Ladi dengan teori terdapat sedikit perbedaan yaitu pada teori dijelaskan bahwa tingkat pematangan seperti pembuatan fitur yang bisa berinteraksi antara pemerintah dengan pengunjung website dan bisa menghubungkan ke antar lembaga (*hyperlink*). Sedangkan dalam E-Pak Ladi tidak bisa menghubungkan secara langsung dari pemerintah desa ke masyarakat hanya menghubungkan beberapa lembaga saja, dimana dibuktikan masyarakat harus ke Kantor Desa untuk mengurus dokumen kependudukannya.
- Sedangkan di tingkat pematangan dalam penelitian terdahulu dalam jurnal Ilmi Usrotin Choiriyah tahun 2020 dengan judul “Penerapan E-Government Melalui M-Bonk di Kabupaten Sidoarjo” di jelaskan sudah sesuai dengan teori yang digunakan bahwa dalam tingkat pematangan adalah membuat situs informasi publik interaktif sebagai sarana dalam menghubungkan komunikasi diantara pihak pelapor dan penerima laporan pengaduan kerusakan jalan di lapangan.

Gambar 4. Fitur apply formulir Permohonan Administrasi Kependudukan



Menunjukkan cara mengupload berkas

- ada tombol add files untuk mengunggah file permohonan situs E-Pak Ladi,
- start upload untuk memastikan data yang di input sudah benar dan mengupload permohonan,
- tombol cancel upload untuk membatalkan permohonan, dan tombol delete untuk menghapus permohonan.

(Sumber : Pemerintah desa karangsono, 2022)



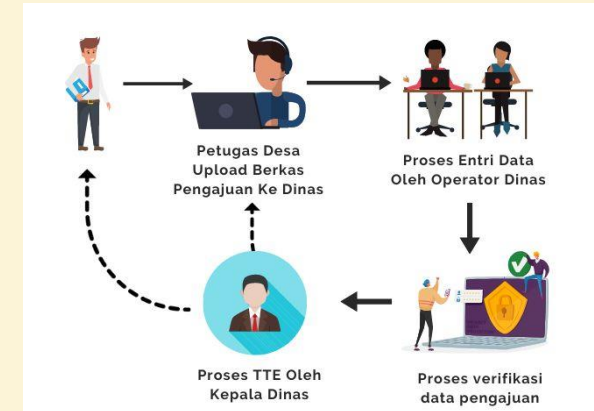
Pembahasan (Hasil Penelitian Lapangan)

Tingkat Pemantapan

- Untuk pemantapan sendiri dalam inovasi E-pak ladi sudah dilakukan dengan menghubungkan data dari Desa secara langsung ke dispendukcapil tanpa harus mengantarkan berkasnya ke kantor dispendukcapil. Dengan itu proses pembuatan administrasi kependudukan yang seharusnya masyarakat masih harus ke dispendukcapil untuk mengantarkan berkas dan mengambil KTP, sekarang hanya melalui Pemerintah Desa sudah bisa serta juga dapat mempersingkat waktu.
- Inovasi E-Pak Ladi ini memiliki beberapa tujuan sehingga Kabupaten Pasuruan menerapkan inovasi tersebut yaitu 1) Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan. 2) Mewujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) khususnya GEPASA (Gerakan Pasuruan Sadar Adminduk). 3) Meningkatkan cakupan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 4) Memudahkan masyarakat dalam mengurus Administrasi Kependudukan tanpa ke Dispdukcapil. 5) Mempersingkat waktu dan tidak membutuhkan atau memakan waktu yang terlalu lama.

Sebagaimana yang bisa dilihat dari Prosedur Pengajuan Dokumen Melalui Inovasi E-Pak Ladi Di Desa Karangsono. Berikut prosedur pengajuan dokumen melalui inovasi E-Pak Ladi seperti yang tertera pada gambar 6 :

Gambar 5. Prosedur Pengajuan Dokumen E-Pak Ladi



Dari teori tingkat pemantapan dengan hasil lapangan tidak ditemukan perbedaan yang artinya sudah sesuai dengan interoperabilitas.

Sedangkan di tingkat pemantapan dalam penelitian terdahulu dalam jurnal Ilmi Usrotin Choiriyah tahun 2020 dengan judul “Penerapan E-Government Melalui M-Bonk di Kabupaten Sidoarjo” di jelaskan bahwa tingkat pemantapan belum dilakukan pada penerapan aplikasi M-Bonk hanya sebagai media pengaduan kerusakan jalan di lapangan oleh masyarakat dengan Dinas PU Bina Marga.

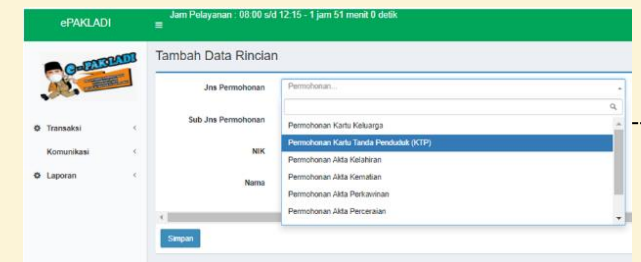
(Sumber : Pemerintah desa karangsono, 2022)

Pembahasan (Hasil Penelitian Lapangan)

Tingkat Pemanfaatan

- Dalam pemanfaatan **G2G (Government to Government)** Inovasi E-pak ladi ini sudah saling menghubungkan ke lembaga pemerintahan lain yaitu menghubungkan secara langsung dari pemerintah desa ke dispendukcapil;
- Pemanfaatan **G2C (Government to Citizen)** yaitu masyarakat tidak lagi membutuhkan waktu yang lama lagi untuk mengurus Administrasi Kependudukan dan masyarakat tidak perlu datang ke dispendukcapil untuk meneruskan berkas dari desa,
- Dan pemanfaatan **G2B (Government to Business)** dalam inovasi E-Pak Ladi masih belum terdapat layanan untuk pelaku bisnis. Berikut contoh gambar di tingkat pemanfaatan dalam inovasi E-Pak Ladi :

Gambar 6. Layanan Administrasi Kependudukan yang tersedia di E-Pak Ladi



Terlihat tidak ada layanan untuk pelaku bisnis, layanan yang tersedia dalam inovasi E-Pak Ladi antara lain : Pembuatan E-KTP, Pembuatan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, KIA (Kartu Identitas Anak), dan Surat Pindah antar Kabupaten.

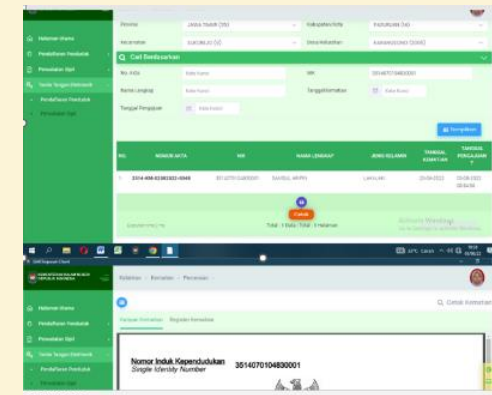
(Sumber : Pemerintah desa karangsono, 2022)

Pembahasan (Hasil Penelitian Lapangan)

Tingkat Pemanfaatan

- Dari tingkat pemanfaatan di lapangan dengan teori ditemukan perbedaan yaitu dalam Teori penerapan e-government di tingkat pemanfaatan ada G2G, G2C, dan G2B, namun hasil di lapangan dalam E-Pak Ladi hanya terdapat pemanfaatan di G2G dan G2C saja.
- Sedangkan di tingkat pemanfaatan dalam penelitian terdahulu dalam jurnal Ilmi Usrotin Choiriyah tahun 2020 dengan judul “Penerapan E-Government Melalui M-Bonk di Kabupaten Sidoarjo” di jelaskan bahwa tingkat pemanfaatan masih belum terdapat pada penerapan aplikasi M-Bonk.

Gambar 7. Tingkat Pemanfaatan G2G dari E-Pak Ladi ke SIAK



Memberikan bukti terkait contoh pemanfaatan **G2G (Government to Government)** dimana hasil dokumen yang dikeluarkan E-Pak Ladi langsung terhubung dan terupdate pada data SIAK.

(Sumber : Pemerintah desa karangsono, 2022)

Pembahasan

B. Kendala Dalam Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis E-Government di Desa Karangsono

Jaringan yang kurang stabil

- Masih sering juga terjadi blank spot sistem.
- Kondisi geografis desa yang masih sulit untuk mengakses jaringan internet dengan kualitas yang baik.

Pendanaan

- Desa tidak mengajukan penerapan program inovasi E-Pak Ladi.
- Banyaknya desa sejumlah 365 Desa mengantri untuk menerapkannya

Sarpras yang belum memadai

Pemerintah desa harus sudah menyiapkan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan Karena nantinya akan dilakukan pemeriksaan dan penginstalan secara langsung oleh pusat.

Apabila diketahui di lapangan sarana dan prasarana belum memenuhi kriteria maka penginstalan layanan E-Pak Ladi di desa tersebut akan tertunda.

Kemampuan SDM

Seorang admin E-Pak Ladi hanya berjumlah satu dan tidak boleh lebih dikarenakan untuk menjaga kerahasiaan data dan fokus data terkumpul hanya disatu tempat serta harus bisa memahami dunia IT dan bisa mengerjakan layanan tersebut

Perbedaan Fokus Program antar Desa

Setiap desa bisa menentukan kebijakannya sendiri. Oleh karena itulah yang menyebabkan 365 Desa tidak serentak langsung untuk melakukan pengajuan penerapan layanan ini sehingga masih ada desa yang belum mengaplikasikan layanan E-Pak Ladi.

Pembahasan (Perbedaan Kendala)

Beberapa kendala yang terjadi dalam Penerapan E-Government di Desa Karangsono hampir sama dengan penerapan e-government melalui M-Bonk di Kabupaten Sidoarjo dalam jurnal Ilmi Usrotin Choiriyah tahun 2020.

- Terkait keterbatasan SDM dalam penerapan M-Bonk, Petugas penerima laporan hanya 1 orang tidak sebanding dengan laporan yang masuk, yang membuat laporan perbaikan jalan ini tidak bisa diselesaikan seketika, harus bertahap (antri).
- Dalam Penerapan E-Pak ladi di desa karangsono pun sama, hanya terbatas 1 orang, untuk admin penerimaan permohonan terkait kependudukan desa tersebut, dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan, selain itu juga harus memiliki kemampuan IT yang kompeten.
- Seharusnya admin E-Pak ladi bisa ditambah jumlahnya sesuai dengan kompetensinya, agar tidak terjadi over-capacity selain itu juga mempercepat proses pengajuan permohonan dari masyarakat.

- Terkait fasilitas (Perangkat Computer) operasional aplikasi M-Bonk yang juga terbatas hanya berjumlah satu perangkat saja.
- Dalam Penerapan E-Pak ladi di desa karangsono pun terkait fasilitas, harus disiapkan secara mandiri oleh pemerintah desa, seperti ruangan khusus, mesin scan dan lain sebagainya, untuk menguji kelayakan nantinya penerapan E-Pak ladi, yang seharusnya sudah ada Guide (Petunjuk) dari pemerintah daerah agar lebih cepat terealisasi dan bermanfaat buat masyarakat.

- Sisi eksternal kurangnya sosialisasi aplikasi M-Bonk pada masyarakat, yang memang dilakukan secara bertahap. Agar masyarakat bisa langsung terhubung dengan pemerintah daerah.
- Sama dengan E-Pak ladi, bahwasannya masyarakat perlu untuk diberi tahu atau disosialisasikan terkait dengan inovasi administrasi kependudukan bahwa, semuanya sudah bisa dilakukan one gate system melalui desa.

Temuan Penting Penelitian

1. Penemuan sebuah inovasi Administrasi Kependudukan berbasis e-government di Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan bernama E-Pak Ladi (Elektronik Pelayanan Langsung Jadi).
2. Dalam temuan inovasi E-Pak Ladi juga ditemukan kendala yang menghambat penerapan E-Pak Ladi di Kabupaten Pasuruan.
3. Menganut dengan teori penerapan e-government yang digunakan bahwasannya hasil penelitian di lapangan sudah sesuai di setiap tingkatannya, namun ada perbedaan dalam tingkat persiapan dan tingkat pematangan.
4. Data primer yang dicantumkan merupakan hasil dari wawancara dan survey dengan Subjek penelitian antara lain: Kepala Desa Karangsono, Sekretaris Desa, dan Admin E-Pak Ladi. Sedangkan untuk Objek penelitiannya adalah Inovasi E-Pak Ladi.
5. Data sekunder yang dicantumkan hasil penerbitan dan kajian literatur yang mendukung penelitian.

Kesimpulan & Saran

Kesimpulan :

1. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis E-Government di Desa Karangsono Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan melalui E-Pak Ladi sudah dilakukan semua di masing-masing tingkatan.
2. Tingkat persiapan diantaranya menyiapkan perangkat keras, SDM yang memiliki memahami dengan dunia IT, dan melakukan sosialisasi secara internal dan publik kepada masyarakat.
3. Lalu tingkat pematangan seperti sudah terdapat fitur apply formulir dan sistem E- Pak Ladi tidak bisa menghubungkan secara langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin mengakses situs resmi E-Pak Ladi tidak bisa karena hanya Admin E – Pak Ladi yang bisa mengaksesnya, namun bisa langsung menghubungkan ke dispendukcapil kabupaten pasuruan.
4. Selanjutnya tingkat pemantapan yaitu sudah dilakukan dengan menghubungkan data dari Desa secara langsung ke dispendukcapil tanpa harus mengantarkan berkasnya ke kantor dispendukcapil.
5. Terakhir tingkat pemanfaatan sudah terdapat pemanfaatannya di G2G dan G2C.

Kesimpulan & Saran

Saran :

- a. Sebaiknya pemerintah pusat dalam hal layanan digital melakukan kerjasama dengan perusahaan jaringan swasta untuk bisa mendapatkan kualitas jaringan internet yang lebih bagus lagi.
- b. Masih perlu adanya peningkatan terkait kemampuan SDM dalam dunia IT dengan menghadirkan sosialisasi dan pelatihan digital sebelum menerapkan layanan E-pak ladi.
- c. Penambahan Layanan dalam Inovasi Layanan E-Pak Ladi sangat disarankan karena sangat memudahkan masyarakat hanya mengurus ke Balai Desa saja, terutama penambahan layanan untuk pelaku bisnis contohnya layanan surat yang bisa menghubungkan ke dinas perizinan.
- d. Melakukan aturan program E-Pak Ladi yang resmi di setiap desa agar penerapan E-Pak Ladi bisa diterapkan di semua Desa Kabupaten Pasuruan secara serentak dan bisa segera membuat Kabupaten Pasuruan Menuju Satu Data.
- e. Melengkapi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang masih kurang menunjang untuk penerapan E-Pak Ladi. Karena sistem dari e-pak ladi hanya bisa di akses oleh petugas desa atau admin e-pak ladi, dan masyarakat harus masih mengantarkan berkas ke balai desa , pemerintah desa bisa membuat sebuah inovasi aplikasi desa yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah desa (E-Pak Ladi) yang tentunya bisa diakses oleh masyarakat bahkan bisa mengapply secara individu, lalu admin E-Pak Ladi hanya tinggal memverifikasi datanya dan meneruskan ke dispendukcapil. Sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor balai desa hanya melalui sebuah aplikasi tersebut.

Referensi

- [1] Herlina, “Pelayanan Pemerintah Desa pada bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala KabupatenLangkat,” Medan, Jul 2018.
- [2] Kamal M, Purwatiningsih A, dan Widi Lestari A, “Kebijakan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan,” *Jurnal Reformasi*, vol. 11(1), hlm. 77–85, 2021, doi: <https://doi.org/10.33366/rfr.v11i1.2071>.
- [3] S. O. Rama dan A. Ramadhan, “Pelaksanaan Sistem Online Pada Pelayanan Perizinan Melalui E-Governance Yang Berbasis Aplikasi (Studi Kasus Aplikasi GAMPIL dan HAYU BANDUNG di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung),” Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2012.
- [4] P. A. Lestari *dkk.*, “Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) Di Era Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 18, no. 2, hlm. 212–224, 2021, doi: <https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.808>.
- [5] L. Mursyidah dan I. Nurfajriyah, “Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Sidoarjo,” *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, vol. 5, no. 1, hlm. 109–124, Mar 2017, doi: 10.21070/jkmp.v5i1.1322.
- [6] Bupati Kabupaten Pasuruan, “Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,” 2021. <https://jdih.pasuruankab.go.id/index.php/hukum/detail/peraturan-bupati-pasuruan-nomor-11-tahun-2021-tentang-pelayanan-administrasi-kependudukan-dan-pencatatan-sipil.html> (diakses Des 27, 2022).
- [7] UU RI, “Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” 2013. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/uu_2006_23.pdf (Diakses Des 27, 2022).

Referensi

- [8] M. Farkhan, D. Samudera, dan V. I. Pertiwi, “Inovasi Pelayanan Publik Melalui Jamsostek Mobile (Jmo) (Studi Kasus Di Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota Surabaya),” *JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik)*, vol. 8, no. Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP), hlm. 152–172, 2022, doi: <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i1.6617>.
- [9] A. Boedi Soesetyo Kasiyanto, “Kebijakan Sistem Pemerintahan E-Government Di Kabupaten Tulungagung,” *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, vol. 1, no. Vol 1 No 1 (2013): March, hlm. 1–20, 2013, doi: <https://doi.org/10.21070/jkmp.v1i1.423>.
- [10] Website Kabupaten Pasuruan, “Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan Targetkan Kios E-Pak Ladi Terlayani Di 365 Desa/Kelurahan,” 2022. <https://www.pasuruankab.go.id/kategori-berita-24-pelayanan-publik.html>. (Diakses Jul 25, 2022).
- [11] Website Kecamatan Sukorejo, “Gelar Uji Coba ‘E-Kios Pak Ladi’ Secara Daring Di Kantor Kec. Sukorejo,” 2020. <http://sukorejo.pasuruankab.go.id/berita-1003-gelar-uji-coba-e-kios-pak-ladi-secara-daring-di-kantor-kec-sukorejo.html> (Diakses Jul 16, 2022).
- [12] Al Fawwas A H, “Implementasi Sistem Online Single Submission dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi,” Malang, 2019.
- [13] Sahariyah N, “Pelayanan Publik Berbasis Daring (Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang),” Surabaya, 2019.
- [14] Kartika D F dan Oktariyanda T A, “Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Poedak (Pelayanan Online Pendaftaran Administrasi Kependudukan) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik,” *Publika (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, vol. 10, no. Vol 10 No 1 (2022), hlm. 245–260, 2022, doi: <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p245-260>.
- [15] J. Viona, “Government (Studi Kasus : Kendala Pemerintah Kota Padang Dalam Penerapan e-Government) Transformation Of Government Management Based On E-Government (Case Study: Padang City Government Constraints in the Implementation of e-Government),” *Jurnal Suara Politik*, vol. 1, no. 1, hlm. 22–28, 2022, [Daring]. Available: www.kotapadang.gov

Referensi

- [16] I. U. Choiriyah, “Penerapan E-Government Melalui M-Bonk Di Kabupaten Sidoarjo,” vol. 5, no. 2, hlm. 126–135, 2020, doi: 10.26905.
- [17] Ulber Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
- [18] V. Savinatunazah, “Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6, No. 2, hlm. 70–77, 2019, doi: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6i2.2276>.

